BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman pada setiap daerah. Keanekaragaman tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan sebagai pariwisata yang dapat menarik wisatawan seperti wisata alam, wisata religi, atau lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yaitu negara kepulauan yang berada diantara samudera pasifik dan samudera hindia. Sehingga menciptakan nuansa alam yang mempesona sebagai salah satu daya tarik wisata. Indonesia juga merupakan salah satu negara dunia yang menyimpan banyak potensi lokal yang melimpah. Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah[1]. Jadi potensi alam pada sebuah daerah bergantung pada geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu industri baru dan mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain dalam negara-negara penerima wisatawan[2]. Di samping bernilai ekonomi tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu potensi. Pariwisata juga

[1]Kiki Endah, *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Desa*, (Jurnal Moderat Universitas Galuh Ciamis Indonesia : Vol. 6 No 1, Februari 2020), hlm. 137.

[2]Ristarnado Joko settyoko Harpinsyah, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata*, (Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah-Universitas Muaro Bungo. Vol. 1 No 1, Juni 2019), hlm. 41.

sangat potensial untuk membangun dan mengembangkan suatu kawasan baik dilingkungan perkotaan maupun perdesaan.

Pariwisata sebagai pendukung perkembangan pembangunan menjadikan bidang ini layak dikembangkan dan dijadikan andalan untuk mendukung adanya pembangunan wilayah, adanya berbagai misi pariwisata. maka daerah yang memiliki potensi dasar cenderung mengembangkan potensi daerah atau desa. Sehingga diharapkan mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar yang nanti tentunya akan berdampak pada pendapatan daerah atau desa, untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir, dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Berbagai kebijakan yang diambil dan ditetapkan pemerintah baik kebijakan nasional maupun daerah. Pariwisata sering kali dicantumkan dalam rencana pembangunan khususnya untuk objek-objek yang menarik dan tidak dimiliki oleh wilayah lain. Fungsi keberadaan suatu objek wisata disuatu tempat mempunyai peran dalam memajukan taraf perekonomian penduduk dikarenakan keberadaan suatu objek wisata mampu menyediakan lapangan pekerjaan baik secara langsung terkait dengan keberadaan pariwisata tersebut maupun bidang kerja lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Salah satu potensi pariwisata yang menjadi ciri khas suatu daerah dan satu tempat dengan tempat lainnya adalah potensi desa. Potensi desa adalah daya, kekuatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat[3].

Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 presentase penduduk pendataan potensi desa (Podes), berdasarkan hasil podes tercatat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 Desa dan 8.444 kelurahan, serta sebanyak 7.323 kecamatan dan 514 kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang dan mandiri. Hasil pengkategorian IPD menghasilkan desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen) desa berkembang sebanyak 53.369 desa (73,40 persen) dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen)[4].

Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa memiliki kebijakan sebagai perwujudan demokrasi penyelenggaran pemerintah desa. Paradigma UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa saat ini memberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal di desanya sesuai dengan *local genius* yang dimiliki. Di mana harapan pemerintah desa nantinya dengan adanya potensi lokal yang ada di desa dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat baik

---

[3]Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa,(* Jurnal Sungkai-Universitas Padjajaran: Vol. 5 No 1, Februari 2017) , hlm. 36.

[4]Badan Pusat Statistik, " Sensus Penduduk 2018"(https://sp2018.bps.go.id/Diakses pada tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 13:40.

dengan diberikan bimbingan, arahan, dan penyadaran, oleh pihak desa atau adanya usaha dari desa untuk menggugah kesadaran masyarakatnya. Dalam mewujudkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri seperti misalnya menjadikan desa sebagai desa wisata dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Seperti halnya pengimplementasian UU desa yaitu terbentuknya politik kebijakan tingkat lokal yaitu terbentuknya potensi di desa yang menjadi naungan dari unit usaha BUMDes. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui konstribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Di dalam pendirian tentunya mempunyai aktor yang berperan penting dalam terbentuknya kebijakan tingkat lokal yaitu pembukaan potensi desa. Namun keberadaan aktor politik yang berada di desa mempunyai kepentingan masing-masing didalam pembukaan awal potensi desa itu sendiri, seperti halnya kepala desa selaku aktor politik pemegang kebijakan di desa tentunya memiliki beberapa kepentingan dalam perumusan kebijakan tersebut sekaligus kepala desa merupakan aktor paling dominan.

Sejalan dengan kepentingan dari kepala desa itu sendiri, tentunya pihak aktor politik yang berada di desa juga mempunyai kepentingan didalam pembukaan potensi desa seperti aktor dari masyarakat desa. Hal ini masyarakat tentunya memiliki ide serta kepentingan tersendiri di dalam pembukaan potensi desa, beberapa kepentingan dari masyarakat pun beragam dikarenakan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, kelompok masyarakat perempuan dan pemuda-pemudi yang ada di Desa Tanjung Lanjut. Adanya kepentingan dan ide yang diberikan berbeda mengakibatkan ketidaksepahaman di dalam pembentukan potensi desa dalam lapisan masyarakat desa, maka dari itu pihak pemerintah desa bersama BPD (badan permusyawaratan desa) harus mengsinkronkan ide yang diberikan dari masing-masing lapisan masyarakat untuk kemasalahatan bersama demi memperbaiki permasalahan yang berada di Desa Tanjung Lanjut.

Dari aktor politik yang tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda di dalam pembentukan politik kebijakan tingkat lokal, namun kepala desa sebagai aktor kekuatan politik yang kuat serta dominan di desa dengan segala pro dan kontra yang ada, beliau mengharuskan pembukaan potensi desa didasarkan kepada permasalahan yang ada di desa yaitu dari segi perekonomian dan masalah infrastruktur, pembukaan potensi desa inilah yang nantinya akan menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tanjung Lanjut. Selain itu juga pembukaan potensi desa juga sesuai dengan salah satu misi desa dan sekaligus sesuai kebutuhan serta potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan melalui BUMDes Desa Tanjung Lanjut yaitu yang diberi nama BUMDes Tanjung Jaya Mandiri.

BUMDes ini didirikan melalui musyawarah desa pada tanggal 13 Juli 2016. Keberhasilan BUMDes ini dapat terukur melalui pendapatan asli desa atas pengelolaan BUMDes yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 BUMDes Tanjung Jaya Mandiri menyetorkan pendapatannya sebesar Rp. 3.303.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 23.979.600, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 27.101.800[5].

Selain itu juga melalui kehadiran BUMDes Tanjung Jaya Mandiri yang berada di Desa Tanjung Lanjut mampu memberikan sebuah prestasi khususnya bagi Kabupaten Muaro Jambi, yaitu mendapatkan penghargaan BUMDes dengan kategori desa percontohan untuk pertumbuhan dan pengelolaan desa melalui BUMDes pada acara malam penganugerahan award yang berlangsung di BUMDes Expo Provinsi Jambi 2019 pada tanggal 13-15 September 2019. Dengan didapatkannya award maka upaya untuk terus meningkatkan serta memaksimalkan terus menerus dilakukan oleh Desa Tanjung Lanjut melalui aparat pemerintah desa. Melalui naungan BUMDes juga wisata yang berada di desa juga dikelola dengan harapan bisa menjadi desa wisata dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Menurut Totok Mardiknto dkk dalam buku pedoman rintisan model desa berdikari Provinsi Jawa Tengah desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, serta memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan

[5]Profil Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

perekonomian yang unik dan menarik dan serta mempunyai potensi untuk dikembangkan pada berbagai komponen kepariwisataan[6]. Seperti halnya yang disampaikan oleh Edi Sugito selaku kepala Desa Tanjung Lanjut tentang wisata danau tangkas, beliau mengatakan:

> "wisata danau tangkas dapat dikatakan sebagai desa wisata danau tangkas dikarenakan potensi yang ada di desa kami yang memiliki daya tarik tersendiri, seperti tumbuhan liar yang tumbuh sehingga membuat keindahan tersendiri wisata ini. Perlu diketahui juga dalam hal sejarah desa sesuai dengan penuturan segenap orangtua tempo dulu bahwasanya danau ini merupakan tempat perkumpulan dewa-dewa, selain itu juga kami juga mengeluarkan peraturan Desa Tanjung Lanjut No 03 Tahun 2017 tentang pengembangan desa wisata"[7].

Berdasarkan tingkat perkembangannya juga desa wisata danau tangkas dapat dikategorikan sebagai desa wisata berkembang yaitu desa wisata yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah dalam swadaya msyarakat/ desa untuk mengelolanya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang sudah mulai tertarik untuk berkunjung[8]. Wisata danau tangkas dalam hal perkembangnya termasuk kedalam wisata berkembang, seperti halnya yang dijelaskan dalam berita jambioce.com yang disampaikan oleh Edi Sugito selaku kepala Desa Tanjung Lanjut, yakni:

---

[6]Toto Mrdikanto, dkk. *Buku Pedoman Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2015*. (Semarang:Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). hlm, 10

[7]Wawancara dengan Edi Sugito selaku kepala Desa Tanjung Lanjut, tanggal 16 Maret 2021

[8]*Ibid*, hlm 12

> "alhamdulilah berkat swadaya masyarakat kita, akhirnya wisata yang berada di Desa Tanjung Lanjut bisa terwujud dan banyak dikunjungi oleh penduduk lokal dan wisatawan luar jambi"[9].

Sesuai dengan teori tingkat perkembangannya, wisata yang berada di Desa Tanjung Lanjut merupakan wisata yang masuk dalam kategori program desa wisata berkembang, dikarenakan wisata danau tangkas merupakan hasil swadaya dari masyarakat bersama pemerintah desa.

Desa wisata danau tangkas merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yaitu terletak di Kecamatan Sekernan Desa Tanjung Lanjut. Letak wisata ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Batanghari dan jarak dari Kota Jambi sekitar 50 KM. Wisata ini merupakan sebuah danau yang memiliki potensi lokal tersendiri menyajikan keasrian alamnya berupa flora dan fauna yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain itu danau tangkas dikelilingi pohon putat *(planchonia valida)* yang memiliki bunga liotin bewarna merah. Saat peralihan musim, dari musim penghujan ke musim kemarau bunga-bunga liotin itu mulai berguguran dan saat berguguran tersebut air danau menjadi merah.

Danau ini memiliki luas sekitar ± 403,11 Hektar. Asal mula dibukanya wisata ini merupakan sebuah inisiatif kebijakan Kepala Desa Tanjung Lanjut yang dipimpin oleh Datuk Edi Sugito, dimana beliau melihat potensi lokal yang ada di danau ini jika dimanfaatkan maka kedepanya dapat berdampak terhadap pembangunan desa. Atas

[9]Jambioce.com, *Wisata Danau Tangkas Ramai Diserbu Wisatawan Luar*, http://jambioce.com/wisata-danau-tangkas-ramai-diserbu-wisatawan-luar Diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 10:23 Wib.

tekad dan rasa optimis beliau maka wisata ini diberikan hak kelolanya kepada BUMDes Tanjung Jaya Mandiri melalui dana penyertaan modal untuk mengelolanya.

Danau tangkas pada dasarnya sudah mulai dikelola secara intensif pada tahun 2017 oleh pemerintah desa, akan tetapi pengelolaanya mulai efektif sejak awal tahun 2018. Pengelolaan diawali pembersihan di wilayah pinggiran danau kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dermaga dan pondokan rakit. Danau ini kemudian dibuka pada 19 Agustus tahun 2018 melalui naungan BUMDes Tanjung Jaya Mandiri dengan keadaan yang masih apa adanya, maka kepala desa memberanikan diri untuk membukanya dan pada waktu itu dibuka dan diresmikan langsung oleh Bupati Muaro Jambi.

Pemerintah Desa Tanjung Lanjut selaku penjabat yang berwenang memberikan perhatian lebih pada objek wisata yang berpotensial menghasilkan pendapatan dan mengarahkan sektor ini sebagai investasi yang menguntungkan kedepannya serta memberikan asumsi yang baik bagi wisatawan dan kemudahan prosedur untuk mengikat daya tarik. Namun tidak hanya pendapatan bagi para pemasukan pemerintah tapi juga kesejahteraan untuk masyarakat di desa. Penanganan objek wisata pada peningkatkatan sumberdaya manusia yang memadai secara konsisten, menyeluruh, terpadu, dan sistematis oleh pemerintah kepada masyarakat perlu dilakukan karena keberhasilan upaya-upaya strategi pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata merupakan salah satu tindakan, baik tindakan pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga terciptanya kerjasama yang baik.

Tabel 1.1
Pemasukan Wisata Danau Tangkas Tahun 2019

No.	Bulan	Penghasilan
1.	Januari	Rp. 370.000
2.	Februari	Rp. 440.000
3.	Maret	Rp. 540.000
4.	April	Rp. 587.000
5.	Mei	Rp. 380.000
6.	Juni	Rp. 640.000
7.	Juli	Rp. 780.000
8.	Agustus	Rp. 815.000
9.	September	Rp. -
10.	Oktober	Rp. 1.020.000
11.	November	Rp. 1.235.000
12.	Desember	Rp. 1.600.000
	Jumlah	**Rp. 8.407.000**

Sumber : Pengelola wisata Desa Tanjung Lanjut Tahun 2019.

Tabel 1.2
Pemasukan Wisata Danau Tangkas 2020[10].

No.	Bulan	Penghasilan
1.	Januari	Rp. 14.200.000
2.	Februari	Rp. 2.840.000
3.	Maret	Rp. 1.700.000
4.	April	Rp. 1.540.000
5.	Mei	Rp.2.020.000
6.	Juni	Rp. 1.720.000
7.	Juli	Rp. 1.760.000
8.	Agustus	Rp. 3.140.000
9.	September	Rp. 2.560.000
10	Oktober	Rp. 3.360.000
11.	November	Rp. 2.300.000
12.	Desember	Rp. 2.860.000
	Jumlah	**Rp. 40.000.000**

Sumber : Pengelola wisata Desa Tanjung Lanjut Tahun 2020.

[10]Pengelola Wisata Danau Tangkas

Berdasarkan dari data di atas, bahwa pendapatan wisata danau tangkas cenderung meningkat pada tahun 2019, tetapi untuk bulan-bulan tertentu mengalami penurunan, seperti pada bulan mei menurun sekitar 20% dari bulan sebelumnya. Disebabkan pada bulan suci ramadhan atau bulan puasa sehingga minat pengunjung untuk berwisata kurang. Penurunan juga dimulai pada bulan september dikarenakan pada bulan ini mengalami musim kemarau sehingga air danau menyurut atau kering, menyebabkan wahana permainan tidak bisa digunakan. Jadi pada tahun 2019 ini pendapatan asli desa (PAD) Desa Tanjung Lanjut kurang lebih 8 juta dari wisata ini. Pada tahun 2020 pertanggal 30 bulan juli kemarin untuk keseluruhan kita mencapai sekitar 25 juta. Dan pada tahun 2020 ini pendapatan asli desa (PAD) Desa Tanjung Lanjut mencapai 40 juta.

Selain itu juga, pengelolaan serta pengembangan wisata danau tangkas yang dimulai dari agustus tahun 2018 sesuai komitmen inovasi desa dan misi desa dengan memanfaatkan dana desa[11]. Di mana nantinya akan menjadi umpan balik untuk pendapatan desa itu sendiri sehingga bisa menjadikan wisata danau tangkas sebagai penghasilan jangka panjang untuk Desa Tanjung Lanjut, yang nantinya akan mengarah kepada perkembangan serta pembangunan desa itu sendiri.

[11]Metro Jambi. *Danau Tangkas Muaro Jambi Dikembangkan dengan Dana Desa* https://metrojambi.com/read/2018/11/12/37183/danau-tangkas-muaro-jambi-dikembangkan dengan dana-desa Di akses tanggal 30 oktober 2020 Pukul 10:30 WIB.

Dari uraian di atas, pemerintah daerah terkhusus pemerintahan Desa Tanjung Lanjut yang berperan penting dalam mengembangkan wisata danau tangkas sehingga dapat mengangkat ekonomi desa apabila setiap objeknya dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berada di sekitar objek tersebut. Sehingga banyaknya kunjungan wisatawan akan berpengaruh pada naiknya pendapatan desa. Memasuki kawasan wisata danau tangkas ada beberapa fasilitas yang disediakan diantaranya adalah wahana permainan, dua unit speed boat, donat boat, bebek dayung, banana boat, perahu tradisional, dan perahu karet. Selain itu juga terdapat seperti pulau tepus yang dilengkapi dengan rumah pohon dan lokasi untuk berkemah, serta bangunan sewa berupa balai pelatihan dan pertemuan. Selain itu ada juga fasilitas kantin apung yang mana dari fasilitas di desa wisata danau tangkas tersebut bisa menambahkan pemasukan untuk desa.

Strategi kebijakan yang diambil melalui wisata danau tangkas juga tidak terlepas dari pemikiran seorang kepala Desa Tanjung Lanjut yang sekarang dipimpin oleh Edi Sugito. Dengan kebijakan yang beliau ambil yaitu memberikan seluruhnya uang dana desa kepada objek wisata danau tangkas telah menjadikan Desa Tanjung Lanjut ini sebagai desa berkembang yang sebelumnya desa tertinggal. Selain itu juga hasil dari objek wisata danau tangkas menjadikan program berkelanjutan dalam jangka panjang, yang nantinya akan mendapatkan pemasukan desa untuk memperbaiki serta membangun Desa Tanjung Lanjut sebagai desa mandiri.

Sejalan dengan strategi tersebut, maka dalam pengelolaan sumber daya alam pedesaan melalui pelibatan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Desa Tanjung Lanjut maka pemerintahan Desa Tanjung Lanjut telah mengeluarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengembangan desa wisata di kawasan Desa Tanjung Lanjut.

Selain itu juga melalui desa wisata ini juga sejalan dengan visi-misi dari Desa Tanjung Lanjut. Visi kepala Desa Tanjung Lanjut untuk enam tahun sesuai RPJMDes Tahun 2019-2025 adalah, ***"terwujudnya masyarakat yang demokratis, cerdas, mandiri, dan sejahtera menuju desa membangun dengan prinsip jujur dan adil"*** visi tersebut mengandung bahwa pemerintah Desa Tanjung Lanjut berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan menyelenggarakan pemerintah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan misi Desa Tanjung Lanjut yang tertera pada RPJMDes tahun 20219-2025 salah satunya adalah***, "mengembangkan seluruh potensi desa demi mewujudkan pendapatan asli desa yang maksimal"*** **.**

Sejalan dengan visi dan misi desa, program serta pencapaian yang tertera di RPJMdes yaitu program Desa Tanjung Lanjut dengan menetapkan Desa Tanjung Lanjut sebagai desa yang lebih maju dalam membangun desa melalui partisipasi masyarakat. Fokus pengembangan ekonomi yaitu melalui desa wisata yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Dilihat dari visi-misi dengan kebijakan serta program yang sudah tertera didalam visi-misi maka dalam

kepemimpinan kepala desa yang sudah 2 berjalan periode telah menghasilkan perubahan yang signifikan di Desa Tanjung Lanjut.

Penelitian yang dilakukan Fitra Ayuningtyas Hidayatullah yang berjudul "Strategi Pemberdayan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten". Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan menggunakan lima tahap yaitu pengembangan SDM melalui pelaihan, seminar dan studi banding, pengembangan kelembagaan kelompok melalui kerjasama BUMDes dan Pokdarwis, pemupukan modal masyarakat dari dana desa, pendapatan asli desa selain itu juga dengan adanya modal sosial. Pengembangan usaha produktif yang dimilki BUMDes yaitu dari proses candi kembar dan care free day serta promosi usaha kecil menengah masyarakat. Penyediaan informasi tepat guna melalui brosur, pamflet, promosi media sosial, dan website. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui tiga tahap yaitu tahap penyadaraan berupa kegiatan sosialisasi, tahap transformasi berupa adanya kemandirian desa, dan lingkungan lebih baik tahap pengayaan berupa berkelanjutan program.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama melakukan politik kebijakannya melalui suatu potensi lokal yang ada di desa tersebut dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada strategi yang digunakan dimana

pada penelitian sebelumnya melalui strategi pemberdayan masyarakat sedangkan pada penelitian ini melalui strategi pengembangan desa wisata itu sendiri[12].

Penelitian yang dilakukan Ahmad Subandi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor terhadap kebijakan mendes PDTT dalam Permendes PDTT No. 5/2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Setelah dilakukan penelitian implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT No. 5/2015 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Hal ini terlibat dari tidak adanya musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) atau unsur masyarakat yang mewakili untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang ditangkap dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi yang berkaitan dengan dana desa serta penggunaannya dan menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas belanja desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu[13].

---

[12]Fitra Ayuningtyas Hidayatullah, *"Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal candi plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi di desa bugisan kecamatan prambanan Kabupaten Klaten"*,Skripsi Program studi luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019. https:/lib.unnes.ac.id Diakses pada 18 desember 2020.

[13]Ahmad Subandi, "*Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor",* Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni terletak pada metode analisis data dimana penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi.

Penelitian ini sangat menarik untuk diangkat karena ketika berbicara tentang sebuah destinasi wisata tentunya tidak asing lagi, misalnya seperti air terjun disuatu tempat tentunya akan sama dengan tempat yang lain karna bentuk serta pesonanya akan sama. Tetapi ketika kita berbicara tentang sebuah danau tangkas yang berada di Desa Tanjung Lanjut tentunya kita akan merasakan pesona tersendiri yang dimiliki oleh keindahan alamnya.

Tetapi disini danau tangkas mempunyai ciri khas tersendiri dimana didalamnya terdapat hutan liotin yang tidak ditemukan wisata lainnya yang biasanya disebut dengan lorong perawan dikarenakan untuk menelusuri hutan tersebut hanya bisa menggunakan perahu kayu disebabkan lorong yang ada kecil dan cuman bisa dilewati satu lorong satu perahu. Bahkan untuk beberapa waktu yang lalu mahasiswa universitas jambi (UNJA) membuat suatu inovasi dari daun pohon putat untuk dijadikan sebuah teh yang mempunyai banyak manfaat.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. http://repository.uinjkt.ac.id/Diakses pada 18 Desember 2020.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**POLITIK KEBIJAKAN BERBASIS POTENSI LOKAL(Strategi Pengembangan Wisata Danau Tangkas di Kabupaten Muaro Jambi)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah untuk penulis melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan aktor politik desa dalam pembentukan politik kebijakan tingkat lokal di Desa Tanjung Lanjut?
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi dalam merumuskan politik kebijakan tingkat lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterlibatan aktor politik desa dalam pembentukan politik kebijakan tingkat lokal di Desa Tanjung Lanjut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam merumuskan politik kebijakan tingkat lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana ilmu politik universitas jambi serta memperluas dan menambah ilmu pengetahuan mengenai politik kebijakan berbasis potensi lokal (strategi pengembangan danau tangkas di Kabupaten Muaro Jambi).

b) Bagi universitas

Sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dengan topik dan masalah yang sama.

c) Bagi pemerintah desa

Sebagai masukan bagi pemerintah yang bersangkutan untuk pembenahan startegi pengembangan wisata agar lebih maju dan memiliki fungsi dan manfaat bagi masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan ilmiah dibidang ilmu politik khususnya yang berkaitan dengan politik kebijakan berbasis potensi lokal (strategi pengembangan wisata) yang kedepannya agar lebih baik.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Politik Kebijakan

Menurut Noam Comsky, seorang filosofi ternama dari *Massachusetts Institute of Tecnology* (MIT), mengatakan bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada kebijakan, maka disitulah terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang "bekerja" dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral[14].

Eksistensi sisi politisi dari sebuah kebijakan itu yang pada praktiknya mewarnai kehidupan manusia dimanapun mereka tinggal dan berada. Selain itu juga hubungan antara politik dan kebijakan ada pada kepentingan itu dan tak jarang antara *politicis* dan *policy goals* merupakan dua hal yang berbeda. Politik berbicara tentang tujuan seperti memperjuangkan nilai dan jabatan *(offices)* berhadapan dengan lawan politik, sementara kebijakan bertujuan untuk menghasilkan solusi terhadap masalah yang perlu mendapat dukungan dari pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut[15].

1.5.2 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan *(Policy)* seringkali penggunannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan *(goals)*, program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan *(policy maker)* istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah

[14]Cahyo Seftyono, *Politik dan Kebijakan*, (Jurnal Politik: Vol. 3, No 1, Agustus 2017), hlm 01.

[15] *Ibid*, hlm 2

apapun karena menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan[16].

Kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn adalah proses atau aktivitas yang dilakukan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan. Ini dilakukan agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dari masalah yang ada[17].

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

---

[16]Arifin Tahir, *Kebijakan Publik&Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm 20.

[17]Wiliam N. Dunn.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 22

William N Dunn menyatakan bahwa dalam proses analisis kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Merumuskan Masalah
   Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
2. Peramalan Masa Depan
   Peramalan atau *Forecasting* adalah suatu prosedur dalam membuat informasi factual tentang masalah kebijakan untuk dapat mengetahui tindakan apa yang dilakukan kedepan sebagai akibat dari alternative yang dikemukan.
3. Rekomendasi Kebijakan
   Dunn menyatakan, prosedur dari analisis kebijakan publik dari rekomendasi memungkinkan dan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan kosekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya.
4. Pemantauan Hasil Kebijakan
   Pemantauan hasil kebijakan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberi informasi tentang sebab akibat kebijakan publik.
5. Evaluasi Kebijakan
   Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan[18].

William N Dunn sebagaimana dalam bukunya Hasel Nogi S. Tangkilisan menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan bagian dari proses analisis kebijakan. Dunn mengembangkan 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis. Semua evaluasi tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informan yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan

[18]*Ibid*, hlm. 95

tanpa berusaha menanyakan te tang manfaat ata nilai-nilai daari hasil target kebijakan[19].

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu :

1. Tujuan yang akan dicapai. Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks

[19]Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik,* (Yogyakarta : Balaiarung & CO, 2003,) hlm 79

sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach atau bottom approach, otoriter* atau demokratis[20].

1.5.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output*, baik kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dirasakan oleh pemanfaat. Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks. Van Meter dan Van Horn, dalam Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahakan pada tercapinya tujuan-tujuan yang telah digambarkan dalam keputusan kebijaksanaan[21].

---

[20]AG. Subarsono, "*Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6-8.

[21]Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Politik*, (Bandung : Alfabeta Bandung, 2014), hlm 138-139

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran itu sendiri. Proses kebijakan secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Maka dari itu keberhasilan mengimplementasikan kebijakan publik sangat tergantung pada keberhasilan mengidentifikasikan jejaring kerjasama antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena akhirnya aktor itulah yang melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat[22].

Mengimplementasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung atau bahkan faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka George C. Edward III sebagaimana dalam Arifin Tahir, menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni Komunikasi *(Communication)*, Sumber daya *(Resourches)*, Sikap pelaksana *(Dispotition or Attitudes)*, dan struktur birokrasi *(Bureaucratic Structure)*[23].

---

[22]Djadja Saefullah, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), hlm. 15.

[23]Arifin Tahir, *Op Cit*, hlm. 61

1. Komunikasi (*Communication)*

   Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan kosisten. Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efekif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditranmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.

2. Sumber daya (*Resourches)*

   Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplemntasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau dengan memberikan pelayanan.

   Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf, diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam menimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi, yaitu dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data keatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
c. Wewenang, yaitu otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
d. Fasilitas, yaitu fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implemtasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan sutau kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplemtasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif[24].

3. Sikap pelaksana (*Dispotition)*

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

[24]*Ibid,* hlm. 67

yang harus dilakukan dan memilki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas mengimpelmentasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independasi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri.

Hal penting yang perlu dicermati pada faktor disposisi menurut George C. Edward III adalah :

a. Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Instensif, pada umumnya orang yang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi instensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan[25].

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih membingungkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Strukture)*

[25]*Ibid*, hlm. 70

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat soleh inefesiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompelsitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Sebagai administrator unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani, asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan[26].

1.5.4 Konsep Nilai Kebijakan Menurut Anderson

Anderson (1979) menyatakan bahwa kebanyakan nilai yang berperan membimbing perilaku pembuat kebijakan dapat disarikan menjadi 5 macam kategori yaitu : (1) Political Values; (2) Organizational Values; (3) Personal Values; (4) Policy Values; dan (5) Ideological Values, diantaranya sebagai berikut:

1. Political Values. Nilai politik, artinya perumus kebijakan dalam memilih alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dengan cara mencari nilai-nilai partai politik di mana ia berafiliasi (menjadi pimpinan atau anggota

[26]*Ibid*, hlm 71-72

partai) untuk kepentingan partainya. ia melihat dan menjadikan kebijakan publik sebagai alat untuk kemajuan dan keuntungan partainya.

2. Organization Values. Nilai organisasi, artinya perumus kebijakan, biasanya birokrat, banyak dipengaruhi oleh nilai organisasinya dalam merumuskan kebijakan publik.
3. Personal Values. Nilai pribadi, artinya perumus kebijakan akan menggunakan nilai kepentingan pribadi seperti kecukupan harta, kekuasaan, reputasi, dan ambisi pribadi dalam merumuskan kebijakan publik.
4. Policy Values. Nilai Kebijakan, artinya perumus kebijakan akan dinilai telah bekerja dengan baik dan tepat secara moral bila mereka mendasarkan perumusan kebijakannya pada nilai kepentingan publik, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan.
5. Ideological Values. Nilai ideologis, artinya perumus kebijakan akan memanfaatkan nilai-nilai ideologis yang mereka anut untuk mendasari kebijakan publik yang akan mereka buat[27].

[27]Muh Irfan Islamy, MDA Modul "*definisi dan makna kebijakan publik"*(http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf)

1.6 Kerangka Pikir.

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji politik kebijakan berbasis potensi lokal melalui strategi pengembangan desa wisata danau tangkas di Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang nantinya menghasilkan output berupa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Gambar 1.1
Kerangka Pikir

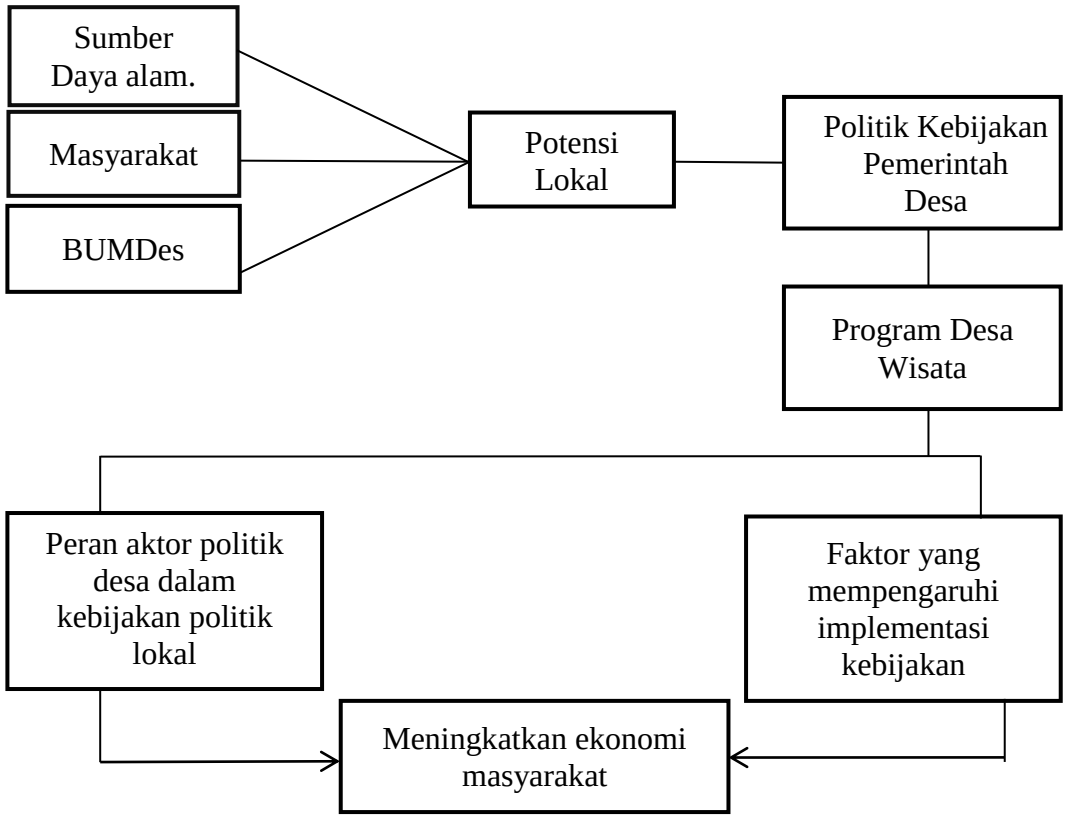

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang ada. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan[28]. Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif karena memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi di lapangan. Selain itu juga penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang aktual dan kemudian data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Lanjut. Pertimbangan penulis meneliti lokasi ini dikarenakan disalah satu Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Desa

[28]Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*(Alfabeta: Bandung, April 2017), hlm. 39

Tanjung Lanjut memiliki potensi wisata yang menarik dan tidak ditemukan di wisata lainnya yaitu berupa wisata danau tangkas yang memiliki bunga liotin bewarna merah saat musim gugur, selain itu juga melalui wisata ini BUMDes yang berada di Desa Tanjung Lanjut mendapatkan BUMDes terbaik se Kabupaten Muaro Jambi sebagai BUMDes desa percontohan untuk pertumbuhan dan pengelolaan desa melalui BUMDes.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian, di mana fokus penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalah-permasalahan yang akan diteliti. Penentuan fokus didasarkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yaitu memilih fokus atau pokok permasalahan yang dipilih untuk diteliti, dan bagaimana memfokuskannya. Oleh karenanya peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap "Politik Kebijakan Berbasis Potensi Lokal (Strategi Pengembangan Wisata Danau Tangkas di Kabupaten Muaro Jambi)"

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[29]. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara, dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal. dan data pendukung yang diperoleh penelitian dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, *Purposive sampling* adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis, Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif[30].

---

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2011) hlm. 225.

[30]*Ibid*, hlm. 48.

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan peneliti adalah orang yang tahu dan memiliki pemahaman terhadap politik kebijakan berbasis potensi lokal melalui strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Muaro Jambi. Berikut ini infoman yang dibutuhkan oleh peneliti:

Tabel 1.3

Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Edi Sugito	Kepala Desa Tanjung Lanjut
2.	Mulyadi, SE	Sekretaris Desa Tanjung Lanjut
3.	Aripin, SE	Manager BUMDes Tanjung Jaya Mandiri
4.	Japar	Pengelola Wisata Desa
5.	Ahmad Yani, S.Sos	Kepala Dusun Tanjung Lanjut
6.	Mustofa	Ketua karang taruna
7.	A. Rahman	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
8.	Uji Rusiana	Ketua PKK Desa Tanjung Lanjut
9.	H Syarif	Ketua Lembaga Adat
10.	Karyono	Tokoh Masyarakat
11.	Darmawi	Ketua RT 01

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Observasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan

pengawasan,peninjauan, dan penyelidikan riset. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis[31].

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari interview. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam

[31]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga edisi Kedua 2009), hlm 86.

penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara[32]:

a. Reduksi Data

Proses dimana seorang peneliti melakukan pendataan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan data dengan sistematik sesuatu dengan yang telah direncanakan. Penyajian bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan[33].

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan interprestasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagian hasil dari kesimpulan.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus

---

[32]Bungin dan Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Edisi ke empat 2012), hlm. 150.

[33]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008), hlm. 123.

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kreditibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data